

**KOLABORASI PEMERINTAH DESA TARUMAJAYA
DALAM MENANGGULANGI RISIKO BENCANA DI WILAYAH HULU
SUNGAI CITARUM PROVINSI JAWA BARAT**

Angela BR Tamba

NPP. 32.0357

Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0357@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Arwanto Harimas

Ginting, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): Weak collaboration between the Tarumajaya Village Government in Bandung Regency and disaster-related sectors is reflected in poor coordination, limited budget allocation, and low levels of community participation. **Purpose:** This study aims to analyze the forms of collaboration carried out by the Tarumajaya Village Government in Bandung Regency in mitigating the risks of natural disasters. **Method** This study uses a qualitative method, with data collection techniques including interviews and documentation. The informant selection technique used is purposive sampling. **Result:** The research results show that, in the negotiation dimension, the process of formulating cooperation between the Tarumajaya Village Government and stakeholders has been carried out through village consultative forums (musdes) and village development planning meetings (musrenbangdes), as well as informal communication via WhatsApp groups. In the commitment dimension, stakeholder involvement is documented in the RPJMDes and RKPDes documents, and through the establishment of the Tarumajaya Rescue disaster preparedness unit; psychological commitment is also evident through voluntary involvement. In the implementation dimension, collaboration is reflected in disaster response training, evacuation, the distribution of logistics and temporary shelters to affected residents, as well as social-based activities such as trauma healing and mental strengthening. In the evaluation dimension, collaborative evaluation has not been carried out in an integrated manner. However, informal evaluations are still conducted as a basis for improvement. **Conclusion:** This study concludes that cross-sectoral collaboration has proven effective in enhancing the disaster preparedness of the village community. For sustainability, it is necessary to strengthen inter-institutional coordination, conduct periodic evaluations, and actively empower the village community.

Keywords: Collaboration; Village Government; Disaster Risk.

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Lemahnya kolaborasi antara Pemerintah Desa Tarumajaya Kabupaten Bandung dengan bagian-bagian terkait bencana seperti koordinasi, minimnya

anggaran dan tingkat partisipasi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tarumajaya Kabupaten Bandung dalam menanggulangi risiko bencana alam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik pengambilan informan yakni *Purposive Sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi negosiasi ditemukan bahwa proses perumusan kerja sama antara Pemerintah Desa Tarumajaya dengan para *stakeholders* telah dilakukan melalui forum musdes dan musrenbangdes dan komunikasi informal melalui grup *Whatsapp*. Pada dimensi komitmen, keterlibatan para *stakeholders* tertulis pada dokumen RPJMDes dan RKPDes serta pembentukan unit siaga bencana *Tarumajaya Rescue* serta komitmen psikologis terlihat keterlibatan secara sukarela. Pada dimensi implementasi kolaborasi tercermin dalam kegiatan pelatihan tanggap bencana, evakuasi, penyaluran bantuan logistik maupun hunian sementara kepada warga terdampak, juga kegiatan berbasis sosial seperti *trauma healing* dan penguatan mental. Pada dimensi penilaian, evaluasi kolaborasi belum dilakukan secara terpadu. Namun tetap dilakukan secara informal sebagai dasar perbaikan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko bencana. Untuk keberlanjutan, perlu peningkatan koordinasi antarlembaga, evaluasi berkala, dan pemberdayaan aktif masyarakat desa.

Kata Kunci: Kolaborasi; Pemerintah Desa; Risiko Bencana.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kerentanan terhadap bencana alam yang sangat tinggi. Letak geografis yang berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia, serta kondisi iklim tropis dengan curah hujan tinggi, menjadikan sebagian besar wilayah di Indonesia rawan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gempa bumi. Berdasarkan data Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2024, tercatat sebanyak 3.472 kejadian bencana terjadi di Indonesia, dengan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak terdampak, yaitu sebanyak 461 kejadian (*Data Bencana Indonesia, 2024*). Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, disusul angin kencang dan tanah longsor.

Salah satu wilayah yang berada dalam zona rawan bencana adalah Desa Tarumajaya yang terletak di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini merupakan bagian dari wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat dengan panjang ±297 km yang melintasi 12 kabupaten/kota. Wilayah hulu DAS memiliki karakteristik geografi yang kompleks dan berisiko tinggi, terutama karena kerentanan terhadap perubahan fungsi lahan, kerapatan permukiman, serta minimnya infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai.

Dalam tiga tahun terakhir, Desa Tarumajaya tercatat mengalami tiga jenis bencana besar secara berurutan: Banjir bandang (April 2021) yang melumpuhkan aktivitas warga dan merusak infrastruktur; Puting beliung (Februari 2024) yang merusak 28 rumah warga; Gempa bumi (September 2024) dengan kekuatan 5.0 magnitudo akibat aktivitas sesar Kertasari yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan fisik signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tarumajaya hidup dalam bayang-bayang ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja. Menurut Quader et al. (2023) tingkatnya tata kelola pengurangan risiko bencana dapat berupa partisipasi baik dari negara, antar-sektor, antar-pemerintah maupun aktor non-negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bersama. Paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya hanya menitikberatkan pada penanganan saat keadaan

darurat, kini telah bergeser menjadi upaya pengurangan risiko bencana yang diwujudkan melalui peningkatan kesiapsiagaan baik dari aparat maupun masyarakat (Ristiani, 2020). Oleh karena itu, pendekatan dalam penanggulangan bencana tidak bisa bergantung pada pemerintah pusat. Karena kesiapan serta kemampuan komunitas lokal dalam mengurangi risiko bencana sangat diperlukan untuk membangun komunitas yang tangguh terhadap bencana (Husein, 2022). Maka dari itu diperlukan kerjasama lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga penanggulangan bencana, tokoh masyarakat, organisasi relawan, serta masyarakat itu sendiri.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanggulangi risiko bencana. Kebijakan sosial sendiri merupakan respon terhadap masalah sosial (Thahir, 2022). Pembuat kebijakan dapat bertindak sebagai negosiator dan memutuskan untuk mengurangi risiko serta memaksimalkan manfaat yang berdampak pada kesejahteraan seluruh komunitas (Meng, 2021). Pemerintah desa, sebagai entitas pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki posisi strategis dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan mitigasi bencana. Mitigasi sendiri mengacu pada tindakan yang mencegah, mengurangi kemungkinan terjadi, atau mengurangi dampak kerusakan bencana (Kapucu, 2008). Pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam menanggulangi bencana perlu melakukan kerjasama maupun bersinergi dengan pihak lain. Sinergi dalam penanggulangan bencana harus selalu ditingkatkan karena tanpa adanya sinergi maka penanggulangan bencana akan terhambat (Rusfiana & Nurseta, 2021). Sayangnya, upaya mitigasi dan respon bencana oleh Pemerintah Desa Tarumajaya sendiri masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga teknis terlatih, dan rendahnya koordinasi antar lembaga. Dalam kasus Desa Tarumajaya, meskipun telah ada upaya kerjasama dengan BPBD dan pihak lain, mekanisme kolaborasi belum berjalan optimal karena belum adanya sistem koordinasi terpadu dan evaluasi bersama.

Desa Tarumajaya menjadi contoh konkret bagaimana wilayah hulu DAS dengan tingkat risiko tinggi membutuhkan pendekatan penanggulangan bencana yang lebih sistematis dan kolaboratif. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana sebenarnya kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dibangun, dijalankan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan praktis dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan dan ketahanan bencana di desa-desa hulu lainnya di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penanggulangan bencana merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya intensitas dan kompleksitas bencana yang terjadi di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun sistem ketangguhan bencana. Namun demikian, mayoritas kajian akademik mengenai topik ini masih terfokus pada tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota atau lembaga vertikal seperti BNPB dan BPBD. Sangat sedikit kajian yang membahas bagaimana kolaborasi aktor dalam penanggulangan risiko bencana berlangsung di tingkat desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah rawan bencana.

Ada beberapa permasalahan nyata yang berkaitan dengan efektivitas kolaborasi Pemerintah Desa Tarumajaya dalam menanggulangi risiko bencana. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa, baik dari segi anggaran, personel, maupun kapasitas teknis. Desa Tarumajaya yang berada di wilayah Hulu Sungai Citarum memiliki

tingkat kerentanan bencana yang tinggi, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gempa bumi. Namun, dalam menghadapi bencana tersebut, upaya mandiri pemerintah desa sering kali tidak memadai karena keterbatasan fasilitas dan koordinasi antar aktor.

Kondisi geografis desa yang berbukit dan berbatasan langsung dengan hutan lindung menyebabkan akses dan komunikasi sering terganggu ketika bencana terjadi. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menghadapi risiko bencana menjadi hambatan tersendiri. Misalnya, masih banyak warga yang enggan mengikuti pelatihan simulasi evakuasi atau tidak memahami prosedur dasar keselamatan saat bencana datang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program pemerintah dan kesiapan aktual masyarakat.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Bandung tahun 2024, beberapa kejadian bencana di Kecamatan Kertasari, termasuk di Desa Tarumajaya, menunjukkan kurangnya sinergi antara pemerintah desa dan lembaga lain seperti BPBD, TNI, Polri, serta organisasi masyarakat. Bantuan yang datang seringkali bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam suatu sistem kolaborasi yang berkelanjutan. Akibatnya, distribusi logistik bencana menjadi tidak merata dan penanganan korban tidak terorganisir secara efektif.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya mekanisme evaluasi bersama setelah bencana terjadi. Selama ini, laporan kejadian disusun oleh pemerintah desa secara administratif, namun tidak dikaji ulang secara kolaboratif untuk memperbaiki sistem penanggulangan. Minimnya platform komunikasi lintas sektor menyebabkan informasi yang dimiliki masing-masing pihak menjadi terpisah dan tidak saling menguatkan. Keterlibatan masyarakat juga masih bersifat pasif. Sebagian warga hanya menerima bantuan tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan atau kesiapsiagaan. Karena keterlibatan segenap masyarakat dalam segala proses pemerintahan akan menghasilkan manfaat kesejahteraan yang dapat dinikmati semua orang (Labolo, 2014). Oleh karena itu, keberhasilan mitigasi bencana sangat tergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Ketimpangan peran antara lembaga formal dan komunitas warga ini menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi.

Dengan adanya realitas tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang fokus pada bentuk kolaborasi yang telah dan sedang dibangun oleh Pemerintah Desa Tarumajaya dalam mewujudkan kolaborasi lintas sektor yang efektif. Sampai saat ini, belum banyak kajian akademik yang secara khusus membahas dinamika kolaborasi penanggulangan bencana di tingkat desa, khususnya di wilayah hulu sungai yang memiliki kompleksitas risiko tinggi seperti Tarumajaya. Penelitian ini juga penting untuk memberikan masukan praktis bagi desa-desa lain di wilayah rawan bencana, terutama di hulu sungai, dalam membangun sistem kolaborasi yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kolaborasi maupun penanggulangan bencana alam. Pertama, Masyhuri et al., (2021) dalam artikelnya yang berjudul *“Kolaborasi antar Stakeholders dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang”*, menunjukkan bahwa kolaborasi dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang dengan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, hasil kolaborasi belum optimal karena kurangnya partisipasi aktif dari stakeholder lokal. Fokus penelitian ini masih pada tingkat kota dan tidak menyoroti peran pemerintah desa secara spesifik. Kedua, penelitian oleh Aziz & Andri (2024) dalam buku *“Strategi Kolaborasi dalam Kebijakan Lingkungan”*, mengkaji strategi kolaborasi dalam dua konteks: penanganan program *Citarum Harum* dan pengendalian Karhutla.

Kolaborasi dilakukan antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan lembaga lingkungan. Meski relevan dengan wilayah Citarum, kajian ini berfokus pada kebijakan tingkat makro, bukan pada praktik pemerintahan desa di lapangan. Ketiga, Raharja (2008) dalam penelitiannya “*Model Kolaborasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*”, menggunakan model kolaborasi McGuire-Agranoff dan menyimpulkan bahwa pengelolaan DAS Citarum belum terpadu karena setiap lembaga bekerja secara sektoral. Raharja menyarankan model interdependensi dalam tata kelola, namun belum mengangkat pemerintah desa sebagai aktor penting. Keempat, Fikri (2020) meneliti kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan PDAM Giri Menang. Teori Huxham dan Vangen digunakan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi. Penelitian ini relevan dari segi pendekatan antarinstansi, tetapi fokusnya pada pengelolaan sumber daya air, bukan penanggulangan bencana. Kelima, Larantika (2019) meneliti “*Kolaborasi Aktor dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung*” dan menggunakan teori Ring & Van de Ven. Penelitian ini penting karena menggunakan teori yang sama, namun objek kajiannya adalah kemiskinan, bukan bencana, dan tingkat pemerintahan yang dianalisis juga bukan desa. Keenam Hidayah & Fitriana (2024) melalui studi “*Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Glagaharjo, Sleman*”, menunjukkan pentingnya partisipasi berbagai aktor seperti BPBD, masyarakat desa, dan lembaga relawan. Ini adalah salah satu dari sedikit studi yang menyoroti desa dalam konteks bencana, namun belum mengulas secara mendalam proses kolaborasi berdasarkan tahapan yang sistematis. Ketujuh, Gunanti et al. (2021) dalam penelitian pengelolaan lingkungan di Desa Kedewatan, menemukan bahwa kolaborasi antara bank sampah dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan ekonomi warga melalui daur ulang. Studi ini berfokus pada pemberdayaan lingkungan desa, namun tidak membahas penanggulangan bencana. Kedelapan, Amalia et al. (2024) meneliti kolaborasi mahasiswa dengan Kelompok Wanita Tani dalam pembangunan agrowisata. Meski konteksnya berbeda, penelitian ini memberikan gambaran mengenai keberhasilan kolaborasi dari sisi komunikasi dan pembagian peran. Kesembilan, Icha Khinanty & Adianto Adianto (2024) dalam studi tentang program *Saber Mempro*, menunjukkan kolaborasi Dinas Kependudukan dan tenaga kesehatan dalam pelayanan publik. Proses kolaborasi melibatkan dialog tatap muka dan kesepakatan bersama, tetapi fokusnya adalah pelayanan administratif, bukan kebencanaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada kolaborasi Pemerintah Desa dalam menanggulangi risiko bencana di wilayah Hulu Sungai Citarum melalui teori kolaborasi oleh Ring & Van de Ven (1994) yang belum banyak diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan dan menganalisis praktik kolaborasi secara langsung pada tingkat desa yang rawan bencana. Penelitian ini memberikan gambaran empiris baru mengenai bentuk dan proses kolaborasi lintas sektor di wilayah pedesaan dengan risiko tinggi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk kolaborasi Pemerintah Desa Tarumajaya dalam menanggulangi risiko bencana di Wilayah Hulu Sungai Citarum.

II. METODE

Desain penelitian berikut ialah selaku pedoman kerja bagi seorang penulis dalam mengerjakan penelitiannya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam kepada 15 informan yang terdiri dari Kepala Desa Tarumajaya, Kepala BPD Tarumajaya, Ketua Karang Taruna, Ketua TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, FK-TAGANA, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, Kepala BBWS Citarum, 6 Warga Desa Tarumajaya yang mengungsi saat terjadi bencana gempa sebagai representasi masyarakat. Adapun informan kunci yakni Kepala Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung karena yang bersangkutan merupakan aktor utama dalam memimpin dan mengkoordinasikan berbagai program, kebijakan serta kolaborasi lintas sektor di tingkat desa.

Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung. Data yang terkumpul bisa dianalisis dan diolah sehingga menjadi informasi yang tepat dan akurat sebagai bahan penelitian (Creswell, 2015). Selain itu penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik untuk memeriksa validitas data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau perspektif dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang (Moleong, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan aplikasi NVivo 12 Plus. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada tanggal 6-25 Januari di Kantor Kepala Desa Tarumajaya, Kantor BPBD Kabupaten Bandung dan Kantor Polsek Kertasari Polresta Bandung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kolaborasi Pemerintah Desa Tarumajaya dalam menanggulangi risiko bencana di Wilayah Hulu Sungai Citarum menggunakan teori proses kolaborasi dari Ring & Van de Ven (1994) menyatakan bahwa kolaborasi dapat dilihat pada empat tahap, yaitu *negotiation*, *commitment*, *implementation*, dan *assessment*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kolaborasi Pemerintah Desa Tarumajaya dalam Menanggulangi Risiko Bencana di Wilayah Hulu Sungai Citarum Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan teori proses kolaborasi Ring dan Van de Ven (1994), proses kolaborasi Pemerintah Desa Tarumajaya dapat dianalisis melalui empat dimensi: negosiasi, komitmen, implementasi, dan penilaian. Berikut hasil analisis kolaborasi Pemerintah Desa Tarumajaya dalam menanggulangi risiko bencana di Wilayah Hulu Sungai Citarum.

1. Negosiasi

Negosiasi dalam kolaborasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu interaksi formal dan negosiasi informal. Berdasarkan hasil *word cloud* NVivo 12 pada indikator interaksi formal (Gambar 1) tampak bahwa kegiatan seperti *musyawarah desa*, *rapat*, dan *musrenbang* menjadi sarana utama negosiasi antarpihak dimana para pihak menghasilkan program penanggulangan bencana untuk menanggulangi risiko bencana yang ada. Pemerintah Desa Tarumajaya secara rutin menyelenggarakan Musdes dan Musrenbangdes yang diikuti oleh lembaga desa seperti BPD, RT/RW, FK-TAGANA, PKK, Karang Taruna, serta unsur TNI-Polri.

Gambar 3



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Selain bentuk komitmen informal yang bersifat psikologis, Pemerintah Desa Tarumajaya juga menunjukkan bentuk komitmen formal kelembagaan. Dalam berkolaborasi penting membuat sebuah komitmen agar setiap pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Pemerintah Desa Tarumajaya dalam hal ini menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai kontrak hukum formal yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemerintah desa serta para pihak yang berkolaborasi dalam penanggulangan bencana.

Selain itu, pembentukan program *Tarumajaya Rescue* merupakan bagian dari program *Desa Tangguh Bencana* (Destana) yang diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 255 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana, Kepala Desa Tarumajaya menetapkan pengurus Destana “Tarumajaya Rescue” dengan masa kepengurusan selama tiga tahun. Pembentukan unit ini merupakan hasil dari musyawarah antara Pemerintah Desa dengan BPD Tarumajaya. Tujuan dari pembentukan *Tarumajaya Rescue* adalah untuk mewujudkan penanganan bencana dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana di lingkungan desa secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan upaya pengurangan risiko berbasis komunitas.

Komitmen Pemerintah Desa Tarumajaya dalam menanggulangi risiko bencana juga tercermin dalam pengalokasian anggaran pada RKPDDes. Berikut ini disajikan data pendukung berupa biaya penanggulangan risiko bencana selama lima tahun terakhir:

Tabel 1
Biaya Penanggulangan Risiko Bencana Desa Tarumajaya Tahun 2020–2024

Tahun	Penyelenggaraan musyawarah & penyusunan RKPDes, RPJMDes, APBDes	Operasional Tarumajaya Rescue	Santunan masyarakat terkena musibah	Pengadaan Peralatan Mitigasi
2020	3.000.000	2.000.000	-	-
2021	3.000.000	2.000.000	20.000.000	25.000.000
2022	3.500.000	2.000.000	20.000.000	25.000.000
2023	3.500.000	2.000.000	20.000.000	27.000.000
2024	5.500.000	2.000.000	25.000.000	31.000.000

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa Pemerintah Desa Tarumajaya secara konsisten mengalokasikan biaya untuk operasional *Tarumajaya Rescue*, santunan kepada masyarakat

terdampak bencana, serta pengadaan peralatan mitigasi. Hal ini menjadi bukti komitmen yang terstruktur dan terencana melalui dokumen legal seperti RKPDes, RPJMDes, dan APBDes. Meskipun pada tahun 2020 belum terdapat alokasi anggaran untuk santunan maupun peralatan mitigasi karena belum terjadi bencana, namun setelah kejadian banjir bandang tahun 2021 dan gempa bumi 2024.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Bapak Abdurrahman selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Januari 2025 “Untuk sementara, kalau membangun fisik mitigasi non-strukturalnya, kami paling membuatkan regulasi. Pedoman, tangguh bencana bagaimana? Pedoman, penanggulangan bencana bagaimana? Kemudian Perbup tentang Destana, desa tangguh bencana bagaimana? Itu salah satu bentuk dari mitigasi struktural berupa kebijakan. Bukan berupa kebangunan ya, berupa kebijakan.”

Komitmen kolaborasi juga tergambar melalui keterlibatan aktif TP-PKK dan Karang Taruna dalam kegiatan pelatihan tanggap bencana dan simulasi evakuasi. Visualisasi *word cloud* NVivo 12 pada indikator *kontrak psikologis* (Gambar 4) memperlihatkan kata-kata seperti “gotong royong”, “inisiatif”, “peran aktif”, dan “kesadaran”, yang mencerminkan adanya rasa tanggung jawab moral dan sukarela dari para aktor lokal. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis, partisipasi organisasi masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi telah berlandaskan pada kepercayaan, komitmen sosial, dan kepedulian terhadap risiko bencana secara bersama-sama.

Komitmen juga tercermin dalam kemampuan aktor untuk meminimalisasi perilaku pemanfaatan gratis (*free rider*). Wawancara dengan Bhabinkamtibmas, Ketua FK-TAGANA, Kepala BBWS Citarum, BPD mengungkap bahwa terdapat hambatan selama proses kolaborasi berlangsung namun Pemerintah Desa tarumajaya telah mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah *free-rider* ini yaitu dengan cara menggunakan aplikasi *Whatsapp* meskipun beberapa pihak merasa komunikasi dan koordinasi belum cepat dan optimal.

Dengan demikian, komitmen dalam kolaborasi antara Pemerintah Desa Tarumajaya dan pihak lainnya tidak hanya bersifat moral dan partisipatif, tetapi juga tertuang dalam bentuk dokumen hukum formal dan kebijakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penanggulangan risiko bencana secara berkelanjutan.

3. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan di mana hasil negosiasi dan komitmen antar aktor direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Dalam konteks Pemerintah Desa Tarumajaya, implementasi kolaborasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu melalui peran organisasi dan peran interaksi pribadi.

Pelaksanaan melalui peran organisasi tampak dalam kegiatan formal seperti simulasi evakuasi, pelatihan tanggap bencana, penyiapan jalur evakuasi, dan distribusi logistik. Pemerintah Desa Tarumajaya bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Bandung, TNI, Polri, serta Tarumajaya Rescue dalam melaksanakan program-program tersebut. Berdasarkan *word cloud* NVivo 12 pada indikator ini (Gambar 4), pelaksanaan melalui peran organisasi ini adalah dengan menjalankan program yang ada yaitu dengan melaksanakan maupun mengawasi program Tarumajaya Rescue, pelatihan tanggap bencana, dan penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan bantuan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Proses kolaborasi Pemerintah Desa Tarumajaya dalam menanggulangi risiko bencana di wilayah Hulu Sungai Citarum dapat dilihat melalui empat dimensi utama, yaitu: negosiasi, komitmen, implementasi dan penilaian.

Pada dimensi negosiasi, Pemerintah Desa Tarumajaya berhasil menjadikan forum musyawarah desa (musdes) dan musrenbangdes sebagai ruang negosiasi utama untuk menyusun program penanggulangan risiko bencana secara partisipatif. Proses ini tidak hanya melibatkan perangkat desa dan lembaga formal seperti BPD, tetapi juga organisasi masyarakat seperti FK-TAGANA, Karang Taruna, dan PKK. Selain itu, komunikasi informal melalui grup WhatsApp desa memperkuat jaringan informasi, memungkinkan tanggapan cepat terhadap potensi bencana. Temuan ini menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan bersifat terbuka dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam pendekatan komitmen, kolaborasi ditandai dengan pengintegrasian program penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan desa, yaitu RPJMDes dan RKPDes. Terbentuknya unit Tarumajaya Rescue sebagai tim siaga bencana berbasis desa menjadi bukti konkret dari komitmen ini. Tidak hanya komitmen administratif, penelitian ini menemukan adanya komitmen psikologis dari warga melalui partisipasi sukarela dalam pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan. Ini memperlihatkan bahwa komitmen tidak hanya bersifat formal, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap risiko bencana.

Pada dimensi implementasi kolaborasi terwujud dalam bentuk pelaksanaan program seperti pelatihan tanggap darurat, simulasi evakuasi, penyaluran logistik, serta pembukaan posko pengungsian saat bencana gempa terjadi pada September 2024. Kegiatan trauma healing yang difasilitasi oleh tokoh agama dan tenaga kesehatan juga menunjukkan bahwa kolaborasi menjangkau aspek sosial-psikologis warga terdampak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi berjalan efektif karena adanya koordinasi yang solid antara aktor formal dan informal, meskipun masih terdapat hambatan pada aspek pendokumentasian kegiatan dan sistem distribusi bantuan.

Sedangkan pada dimensi penialain, ditemukan bahwa proses evaluasi kolaborasi belum berjalan secara sistematis. Evaluasi yang ada bersifat informal dan tidak terdokumentasi dalam laporan khusus. Padahal, evaluasi sangat diperlukan untuk menilai keberlanjutan kolaborasi dan efektivitas intervensi. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa kolaborasi yang baik memerlukan sistem umpan balik yang terstruktur, agar perbaikan dapat dilakukan berdasarkan bukti dan refleksi bersama.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam proses kolaborasi bencana tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial desa. Pemerintah Desa Tarumajaya telah menunjukkan kapasitas adaptif dalam mengelola risiko bencana melalui pendekatan kolaboratif yang menyeluruh. Namun, ke depan diperlukan perbaikan pada aspek evaluasi dan dokumentasi agar praktik kolaborasi ini dapat direplikasi oleh desa lain dengan lebih sistematis.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tarumajaya dalam menanggulangi risiko bencana telah berjalan pada empat tahapan utama: negosiasi, komitmen, implementasi, dan penilaian. Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai aktor seperti BPBD, TNI/Polri, organisasi masyarakat, dan warga desa. Pemerintah desa memainkan peran sentral sebagai fasilitator dalam merancang program, membentuk kelembagaan seperti Tarumajaya Rescue, serta menyusun dokumen perencanaan berbasis mitigasi bencana.

Meskipun secara umum kolaborasi telah berjalan baik, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan seperti koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, keterbatasan anggaran, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah pada tahap perencanaan. Temuan ini memperkuat pentingnya peran pemerintah desa sebagai aktor kolaboratif dalam penanggulangan bencana di wilayah hulu sungai yang memiliki risiko tinggi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan waktu. Penelitian hanya difokuskan pada satu desa, yaitu Desa Tarumajaya, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk semua desa rawan bencana di wilayah hulu Sungai Citarum. Selain itu, proses pengumpulan data dilakukan dalam waktu terbatas, yang membatasi pendalaman data terutama pada aspek evaluasi kolaboratif dari sisi aktor eksternal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada beberapa desa dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda guna mendapatkan pemahaman komparatif terhadap pola kolaborasi di wilayah rawan bencana. Selain itu, pendekatan studi longitudinal dapat dilakukan untuk menilai perkembangan efektivitas kolaborasi dalam jangka waktu tertentu, khususnya pasca intervensi program mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Tarumajaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian juga kepada seluruh informan dalam penelitian ini, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., Saefullah, A., Putri Yolita, R., Rumua, Y., Fadly Yulisansyah, M., Khaila, P., Nurhidayat, M., Putra Pratama, K., Meisya Putri, A., Suci Rahmadini, A., Syahrani, E., Lestari, W., Syafirlah, A., Hamid, A., Hafizh, A., & Aini, E. (2024). Kolaborasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Agrowisata Di Kelompok Wanita Tani Garuda 12 Cipayung Kecamatan Ciputat. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(1), 36–48. <https://jurnal.stieganessa.ac.id/index.php/jcre/article/view/38>
- Aziz, Y. M. A., & Andri, Y. (2024). *Strategi Kolaborasi dalam Kebijakan Lingkungan (Dinamika Konsep dan Studi Kasus)* (M. N. Afandi (Ed.); 1st ed.). PT Dunia Pustaka Jaya. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=t4aWkvQAAAAJ&citation_for_view=t4aWkvQAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (S. Z. Qudsy (Ed.); 3rd ed.). Pustaka Belajar. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37624/1/penelitian.pdf>
- Data Bencana Indonesia. (2024). BNPB. <https://gis.bnpb.go.id/>
- Fikri, A. (2020). *Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*. https://repository.ummat.ac.id/1478/1/COVER%2C_1-3%5B1%5D.pdf
- Gunanti, A. A. I. P., Permana, G. P. L., & Gama, A. W. O. (2021). Kolaborasi antara Bank Sampah dan Masyarakat Desa Kedewatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bernilai Ekonomis. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 188–195.

- <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4615>
- Hidayah, N., & Fitriana, K. N. (2024). Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 02(04). <https://doi.org/10.21831/joppar.v2i4.22173>
- Husein, R. (2022). Localizing disaster risk reduction: a case study of community-based disaster preparedness in Bima and Palangkaraya Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 989(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/989/1/012027>
- Icha Khinanty, & Adianto Adianto. (2024). Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(2), 205–212. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i2.152>
- Kapucu, N. (2008). Collaborative emergency management: Better community organising, better public preparedness and response. *Disasters*, 32(2), 239–262. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2008.01037.x>
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. PT. Raja Grafindo Persada. <https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799/>
- Larantika, A. A. A. D. (2019). *Kolaborasi Aktor dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung Provinsi Bali* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189456/>
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., Priyadi, B. P., Publik, J. A., Ilmu, F., Politik, I., & Diponegoro, U. (2021). Kolaborasi antar Stakeholders dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854–862. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759>
- Meng, L. (2021). Using iot in supply chain risk management, to enable collaboration between business, community, and government. *Smart Cities*, 4(3), 995–1003. <https://doi.org/10.3390/smartcities4030052>
- Moleong, J. L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. <https://www.scribd.com/document/379441196/Metode-Penelitian%0AKualitatif-Lexy-J-Moleong>
- Quader, M. A., Khan, A. U., Malak, M. A., & Kervyn, M. (2023). Mainstreaming Decentralization and Collaboration in Disaster Risk Management: Insights from Coastal Bangladesh. *International Journal of Disaster Risk Science*, 14(3), 382–397. <https://doi.org/10.1007/s13753-023-00495-w>
- Raharja, S. J. (2008). *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=126160>
- Ring, P. S., & Van de Ven, A. H. (1994). Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships. *The Academy of Management Review*, 19(1), 90–118. <https://doi.org/10.2307/258836>
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 126–138. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113>
- Rusfiana, Y., & Nurseta, H. (2021). Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Melalui Strategi Kampanye Militer dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL: KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN*, 4, 17–26. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.46>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (Ed.); 2nd ed.). Alfabeta. https://www.academia.edu/44502098/Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuantitatif_kualitatif_dan_r_and_d_intro_PDFDrive_1_
- Thahir, B. (2022). Is There Any Collaborative Governance on Post-disaster Social Policy in Banten Province? *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 329–338. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.329-338>